

KOTA PROBOLINGGO PADA MASA MENJELANG DAN AWAL REVOLUSI

THE CITY OF PROBOLINGGO AT THE BEGINNING OF THE LEAD AND REVOLUTION

Ari Sapto

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang
arisapto@mhum.yahoo.com

Abstrak

Masa Revolusi tidak bisa dilepaskan dengan kondisi pada masa sebelumnya. Meski terjadi perubahan yang bersifat fundamental pada masa revolusi, anasir-anasir masa sebelumnya masih tampak memengaruhi, bahkan ada yang tetap eksis. Probolinggo kategori kota kecil, kota pelabuhan yang memiliki dukungan pertanian dan perkebunan, sejak abad ke-19 telah memiliki arti penting bagi pemerintah kolonial Belanda. Sebagai bekas wilayah kerajaan, pengaruh Mataram masih demikian kuat. Tidak saja di bidang fisik kota, tetapi juga bidang sosial budaya. Namun, letak geografis yang berhadapan langsung dengan Pulau Madura, menyebabkan penduduk Madura dengan mudah migrasi ke Probolinggo. Orang-orang Madura menjadi mayoritas dan di bidang budaya terjadi percampuran antara Jawa dengan Madura. Di bidang ekonomi orang-orang Jawa masih tekun bertani sawah, sementara orang-orang Madura memasuki sektor yang lebih bervariasi.

Kata kunci: penduduk, Probolinggo, revolusi, sosial-ekonomi

Abstract

The revolution era was inseparable from the earlier period. Despite the radical changes during the revolution, the previous elements remained in existence and had significant influences. Probolinggo was a small town, a sea port having agricultural and plantation bases and from the 19th century had an important significance for the Dutch colonial rule, not only in physical but socio-cultural as well. Its geographical location near to Madura made it easily accessible for Madurese migration. The Madurese people grew to become the majority and in cultural terms, there was a mix of Madurese and Javanese elements. In the economic sector, the Javanese mostly engaged in wet field agriculture, while the Madurese occupied a more heterogeneous employment.

Keywords: population, Probolinggo, revolution, socio-economy.

A. Pendahuluan

Bagi pemerhati masalah perkembangan pamongpraja atau administrasi pemerintahan di Indonesia, kota Probolinggo akan selalu diingat dan menjadi sering disebut, sebab Probolinggo salah satu dari empat kota di Indonesia yang memiliki *Hoofdschool* (Sekolah Raja). Tiga kota lainnya yaitu Tondano,

Bandung, dan Magelang. *Hoofdschool* adalah sekolah yang mendidik bumiputera untuk dijadikan tenaga administrasi pemerintahan kolonial. Dalam perkembangannya *Hoofdschool* berganti nama menjadi *Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA, Sekolah untuk Pendidikan Pegawai Bumiputera). Ketika statusnya ditingkatkan menjadi seko-

lah menengah, namanya berubah menjadi *Milddelbare Opleidings School voor Inlandse Ambtenaren* (MOSVIA) (Soetjiatingsih dan Sutrisno Kutoyo, 1980/1981:102-103). Bagi pemerhati Sejarah Pendidikan, Probolinggo (dan Surabaya) diingat sebagai kota pertama di Jawa Timur yang memiliki Sekolah Dasar Negeri untuk bumiputera yang menggunakan bahasa Melayu. Penekanan penggunaan bahasa Melayu perlu dilakukan, karena pengakuan sebagai *lingua franca* oleh pemerintah kolonial Belanda mendorong akselerasi perkembangannya nasionalisme di kalangan bumiputera (Kahin, 1995: 51). Bahasa Melayu sebagai senjata untuk melawan pengaruh Belanda. Formulasi nyata perlawanan tampak dalam Sumpah Pemuda.

Pada masa revolusi, Probolinggo mencatat kontribusi penting. Ketika pelabuhan di Jakarta, Semarang, dan Surabaya dikuasai tentara Sekutu dan kemudian tentara Belanda, bantuan beras yang dijanjikan pemerintah Syahrir untuk India, dikirim melalui pelabuhan Probolinggo. Sukses pengiriman ditunjang oleh daerah Karesidenan Besuki, di bagian timur Probolinggo, sebagai gudang beras dan kemampuan Divisi Suropati memberikan jaminan pengamanan. Di samping itu, Probolinggo salah satu dari sedikit kota di Indonesia, yang taktik perlawanan gerilyanya terhadap pemerintah pendudukan Belanda pada masa revolusi nasional dapat berlangsung secara intensif, bahkan hingga pengakuan kedaulatan.

Tulisan ini mendeskripsikan kondisi kota Probolinggo dalam dimensi sejarah. Hal itu penting untuk modal memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa revolusi. Mereka yang menganggap dirinya ahli sejarah kota biasanya paling suka memanfaatkan teori-teori tertentu. Meskipun analisis dalam tulisan ini tanpa mengacu teori tertentu, dalam uraian bersinggungan dengan, umpamanya, teori urbanisasi atau migrasi seperti dikembangkan Louis Wirth, atau teori perkembangan teknologi yang terkait dengan nilai-nilai sosial budaya dari Max Weber, juga

teori ekologi kota (Kartodirdjo, 1977), hal ini bukan suatu kesengajaan. Karakteristik kota Probolinggo (meskipun tidak sepenuhnya) sesungguhnya lebih dekat pada ciri-ciri kota yang perkembangannya bisa dilihat pada awal abad ke-20. Menurut Kuntowijoyo (1994:54) ciri-ciri kota awal abad XX sebagai berikut.

Pertama, sektor kota tradisional yang ditandai dengan pembagian spasial yang jelas berdasarkan status sosial dan dekatnya kedudukan pemukim dengan kraton. Kedua, sektor pedagang asing, terutama pedagang Cina, yang mewarnai kehidupan kota dengan gaya bangunan, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya tersendiri. Ketiga, sektor kolonial dengan benteng dan barak, perkantoran, rumah-rumah, gedung *societeit*, rumah ibadah *vrijmetselarij*. Keempat, sektor kelas menengah pribumi yang kadang-kadang mengelompok dalam kampung-kampung tertentu, seperti Kauman di kota Yogyakarta atau Surakarta, atau di bagian lain. Kelima, sektor imigran yang menampung pendatang-pendatang baru di kota dan berasal dari pedesaan di sekitar.

Menurut Kuntowijoyo (1994:55-62) selanjutnya, garapan sejarah kota meliputi perkembangan ekologi kota, transformasi sosial ekonomi, sistem sosial, problema sosial, dan mobilitas sosial. Permasalahan yang hendak dicari jawabnya dalam tulisan singkat ini adalah bagaimana latar belakang sejarah, kondisi penduduk, penduduk, dan sosial ekonomi kota Probolinggo pada masa sebelum dan awal revolusi?

B. Sejarah Singkat

Probolinggo sebelumnya bernama Banger. Dalam *Negarakerlagama* pupuh XXXIV/4 disebutkan: "Agak lama berhenti seraya istirahat; mengunjungi para penduduk segenap desa; kemudian menuju Sungai Gawe, Sumanding, Borang, Banger, Baremi lalu lurus ke barat" (Slametmulyana, 1979:290). *Negarakerlagama* yang melukiskan perjalanan

raja Hayam Wuruk menunjukkan bahwa Banger menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit. Daerah ini pernah menjadi wilayah Kerajaan Blambangan. Kerajaan Demak gagal menaklukkan Banger, karena rajanya, Trenggono, meninggal di Pasuruan ketika mencoba melakukan ekspansi ke wilayah timur. Sultan Agung dari Mataram melalui serangan militer berhasil menaklukkan seluruh ujung timur Jawa Timur di tahun 1639, termasuk Banger (Graff, 1986:262-271). Selama lebih dari satu abad kemudian Banger menjadi daerah kekuasaan Mataram. Menurut sistem pembagian wilayah kerajaan Mataram, Banger menjadi bagian daerah *pebisiran* timur. Pada tahun 1686 Untung Suropati membangun kekuasaan di Pasuruan. Wilayahnya membentang dari Blambangan, Panarukan, Probolinggo, Pasuruan, dan Malang. Untuk menundukkan Untung Suropati, Mataram minta bantuan Kumpeni dan baru berhasil tahun 1714 (Lekkerkerker, 1931:484).

Banger dalam bahasa Jawa berarti 'berbau busuk'. Nama ini dipandang bermakna kurang baik dan kurang sedap didengar, sehingga diubah. Perubahan nama Banger menjadi Probolinggo terjadi pada masa kekuasaan Bupati Joyonagoro tahun 1770. Probolinggo berasal dari kata *praba* dan *lingga*. *Praba* berarti sinar atau cahaya dan *lingga* berarti (lambang) kekuatan atau kejantanan. Probolinggo sering diartikan sebagai kekuatan yang bercahaya (Stibbe dan Sondbergen, 1939:1523; Lekkerkerker, 1931:482). Versi lain yang berdasar dongeng, nama Probolinggo berasal dari kata *prabu* dan *linggih*, artinya raja atau tamu agung yang berkenan singgah. *Prabu linggih* mengalami proses perubahan ucap menjadi Probolinggo (Waluyo, 1995:5). Sekitar tahun 1950-an penduduk sekitar Probolinggo, seperti Pasuruan, Lumajang, dan Besuki, bila akan ke Probolinggo masih sering mengatakan "akan ke Banger" (Sapto, 1999:22). Dapat diduga bahwa nama Probolinggo populer dalam bidang administratif pemerintahan, sementara dalam pergaulan sehari-hari, penduduk masih

menggunakan nama Banger. Nama Banger pada waktu kemudian masih dapat ditemukan sebagai nama sungai yang melintasi kota. Cerita rakyat setempat memberitakan bahwa nama Banger berasal dari bau genangan air. Sungai Banger dahulu memiliki aliran yang lebar, sehingga dapat dilalui perahu. Sampai tahun 1970-an masih banyak perahu nelayan yang mengangkut ikan untuk dijual di pasar ikan yang terletak di tengah kota. Akan tetapi, sekarang sungai telah menyempit dan dangkal, bahkan di beberapa tempat bagian atasnya ditutup dengan beton cor (Sapto, 1999:23). Muara sungai berakhir di bagian timur pelabuhan. Pada saat-saat tertentu air meluap meninggalkan genangan yang berbau busuk (*banger*).

Pada abad XVI, Probolinggo memiliki posisi yang unik. Wilayah ini menjadi pembatas kekuasaan Kerajaan Blambangan di bagian timur dan Kerajaan Mataram di bagian barat. Wilayah ini juga semacam benteng hinduisme yang dipertahankan oleh Blambangan terhadap desakan Islam (Lekkerkerker, 1931:482). Secara perlahan-lahan proses islamisasi berlangsung mulai abad XVII. Proses ini tidak sepenuhnya berhasil, mengingat pertahanan Hindu yang kuat di antara penduduk Tengger.

Sebagai akibat perjanjian yang ditandatangani pada 11 Nopember 1743 antara Gubernur Jenderal van Imhoff dengan Sunan Pakubuwono II, Probolinggo jatuh ke tangan Kumpeni (Lekkerkerker, 1931:485). Perjanjian ini terlaksana sebagai akibat keterlibatan Mataram dalam peristiwa Pemberontakan Cina (1740-1743). Kelompok yang anti Belanda di Mataram menggunakan kesempatan memerangi VOC dan membebaskan diri dirinya. Kelompok yang dipimpin oleh Patih Natakusuma bekerjasama dengan orang-orang Cina (Kartodirdjo, 1987:223-226). Berdasarkan perjanjian, seluruh ujung timur Jawa Timur menjadi daerah kekuasaan VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) atau Kumpeni.

Kerajaan Blambangan menolak aneksasi VOC, sebab lebih suka berada di bawah ke-

kuasaan raja Bali. Sejak saat ini Blambangan terus terlibat konflik dengan Kumpeni sampai akhirnya dapat ditaklukkan di tahun 1767. Penguasa Tengger, Panembahan Semeru, juga tidak mau mengakui Kumpeni. Sikapnya ini menimbulkan konflik dengan bupati Probolinggo Kyai Joyolalono, penguasa yang diangkat VOC. Melalui siasat licik, Kyai Joyolalono akhirnya berhasil membunuh penguasa Tengger. (Tjiptoatmodjo, 1983:269; Lekkerkerker, 1931:485). Ketika van Imhoff mengadakan perjalanan untuk menjamin pelaksanaan perjanjian, pada tahun 1746, Probolinggo didapati sebagai daerah yang mengalami kerusakan akibat perang antara Kumpeni dengan Kerajaan Blambangan. Oleh karena kemiskinannya, daerah ini untuk beberapa saat dibebaskan dari kewajiban menanggung perjalanan dinas, tetapi masih diwajibkan menyerahkan hasil dari cukai impor, pajak pelabuhan dan menyetorkan tenaga kerja. Pada tahun 1784 kondisinya menjadi lebih baik, sehingga diwajibkan menyeter upeti 40 koyang beras, uang 450 ringgit, nila, dan sarang burung (Lekkerkerker, 1931:485).

Penguasa daerah dipertahankan dengan syarat memenuhi setoran tahunan dan tidak merugikan kekuasaan Kumpeni. Probolinggo menjadi daerah yurisdiksi Kumpeni, bupati-bupatinya menjadi bupati Kumpeni. Kewajiban mereka terhadap raja Mataram dengan segala adat upacaranya dialihkan kepada Kumpeni. Kewajiban ini dimanfaatkan untuk kepentingan perdagangan dan rumah tangga Kumpeni. Menurut Kartodirdjo (1987:13) upeti yang wajib diserahkan kepada Kumpeni tidak hanya ditentukan waktu penyerahannya, tetapi juga ditentukan jumlah dan jenisnya, yang disesuaikan dengan kepentingannya, seperti beras, minyak kelapa, dan kayu bahan bangunan. Tenaga kerja yang diserahkan untuk mengangkut barang, memelihara jalan, memelihara dan membersihkan bangunan-bangunan di benteng. Bupati Kyai Jokolalono dijadikan semacam *leverancier* Kumpeni.

Barang-barang dan tenaga manusia yang disediakan untuk kumpeni, oleh bupati Joyolalono didapat menurut adat yang berlaku, yaitu adat hubungan feodal tradisional bupati dengan desa-desa yang terletak di lingkungan kekuasaannya. Kumpeni tidak ikut campur tangan mengenai hubungan ini. Adat hubungan feodal merupakan konsep *kawulogusti* yang mendasari konsep kekayaan dan kekuasaan golongan priyayi. Dalam konsep ini dijelaskan bukan luas perbatasan yang penting, melainkan jumlah penduduk dan kemampuan untuk memobilisasi penduduk untuk keperluan produksi, mendirikan bangunan dan perang (Onghokham, 1983:61-62).

Kumpeni menyewakan desa-desa ke pihak swasta, kebanyakan orang-orang Cina kaya. Praktik persewaan desa dilakukan dengan menyerahkan sejumlah desa dengan membayar uang sewa. Burger (1960:169) menjelaskan sebagai berikut.

... bahwa desa-desa disewakan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3, 5, 8 atau 10 tahun. Selama jangka waktu persewaan itu, pihak penyewa memiliki kekuasaan untuk menarik penghasilan dari desa itu. Hak atau kekuasaan itu diartikan secara luas, sehingga penyewa dapat menuntut penyerahan hasil bumi, misalnya beras dan hasil tanaman lain, serta jasa dari penduduk desa setempat.

Desa yang disewa banyak digunakan untuk kepentingan usaha penanaman dan penggilingan tebu. Usaha ini banyak dilakukan oleh orang-orang Cina. Untuk usaha semacam itu, sering orang-orang Cina menyewa beberapa desa sekaligus untuk jangka waktu tiga tahun atau lebih. Penduduk desa-persewaan diwajibkan untuk mengerjakan pekerjaan dan pemotongan tebu di ladang, pengangkutan ke penggilingan, dan pekerjaan penggilingan. Para penduduk ini mendapat bayaran menurut banyak sedikitnya air tebu yang dihasilkan (Kartodirdjo dan Surjo, 1991:38-39).

Kebutuhan akan dana mendorong Daendels menjual daerah Probolinggo kepada seorang Cina bernama Han Tik-Ko (Probolinggo, No. Inv. 6 d, ANRI, 1813:7). Kebijakan ini diambil memperhatikan saran van Ljsseldijk, seorang pejabat Kumpeni yang pada akhir abad ke-18 mengadakan peninjauan ke Probolinggo. Harga jual disepakati sebesar 1.000.000 ringgit (*rijksdaalders*). Pembayaran dengan cara diangsur selama 10 tahun. Setiap bulan Juni pembeli diharuskan mengangsur sebesar 50.000 ringgit dan pada bulan Desember sebesar 50.000 ringgit, sehingga lunas dalam 20 kali angsuran. Pembeli sudah harus mulai mengangsur pada akhir tahun 1811. Pembeli menerima hak atas semua hutan jati dan dibebaskan dari semua penyerahan wajib serta tanaman paksa. Sebaliknya, cukai semua ekspor dan impor tetap dipungut pemerintah. Ini juga berlaku atas penjualan candu. Kepada pemerintah tetap disetorkan cukai atas sabung ayam, pemeliharaan ternak, dan pemotongan hewan. Pembeli juga diwajibkan merawat semua jalan umum dan melakukan pengangkutan bagi dinas pemerintah dengan tarif yang berlaku umum (The Acting Resident: Surabaya, Probolinggo, Besuki, Panarukan. No. Inv. 6 b, ANRI, 1813:175-179).

Keadaan di ujung timur Jawa Timur kekurangan sarana tukar. Pembayaran sebesar harga beli tidak mungkin dilakukan oleh Han Tik-Ko. Untuk menjamin pemerintah mendapatkan biaya pembelian, atas usul Daendels, dilakukan pembuatan jenis uang kertas baru senilai satu juta ringgit. Uang kertas ini diberi nama Uang Kertas Probolinggo (Lekkerkerker, 1931:505-506).

Han Tik-Ko memperoleh gelar Mayor Cina dan tuan Tanah Probolinggo dan mendapat izin membawa senjata (The Acting Resident: Surabaya, Probolinggo, Besuki, Panarukan. No. Inv. 6 b, ANRI, 1813:179; Lekkerkerker, 1931:506). Kedudukannya setingkat bupati. Oleh penduduk penguasa baru ini diberi gelar sebagai Babah Tumenggung. Babah adalah sebutan bagi orang Cina kaya yang menetap

di Hindia Belanda. Sedangkan Tumenggung adalah jenjang kepangkatan bupati yang paling bawah. Babah Tumenggung dapat diartikan sebagai bupati keturunan Cina (Stibbe dan Sondbergen, 1939:1523). Bupati sebelumnya, Raden Tumenggung Joyodiningrat dipindahkan ke Sedayu (Gresik), tetapi keluarganya masih terasa kuat pengaruhnya di Probolinggo (Lekkerkerker, 1931:506).

Untuk memenuhi kewajiban pembayaran, penguasa baru berusaha memeras dan memberikan beban yang berat kepada rakyat. Di samping itu, Han Tik-Ko juga harus menghadapi oposisi dari keluarga bupati lama. Akibatnya, ketidakpuasan muncul di mana-mana. Puncaknya meletus dalam bentuk perlawanan rakyat yang berlangsung tanggal 18 Mei 1813. Peristiwa ini dikenal sebagai Perang Kedopok, dikenal juga dengan Kepruk Cino. Kedopok adalah sebuah desa di wilayah kota, tempat rakyat petani banyak mendukung pemberontakan ini. Dikenal dengan Kepruk Cino karena sasaran utama pemberontakan adalah orang-orang Cina, terutama keluarga Han Tik-Ko. Dalam peristiwa ini Han Tik-Ko terbunuh (Stibbe dan Sondbergen, 1939:1523; Lekkerkerker, 1931:496). Akibat peristiwa ini, Raffles kemudian menebus daerah Probolinggo dari keluarga Han Tik-Ko.

Setelah pemberontakan, selama lima tahun Probolinggo tidak mempunyai penguasa bumiputera. Baru pada tahun 1818 diangkat Raden Tumenggung Aryo Notoadiningrat sebagai penguasa. Bupati Aryo Notoadiningrat hanya memerintah selama tiga tahun, pada tahun 1821 dipindahkan ke Lasem. Kembali terjadi kekosongan penguasa bumiputera. Pada tahun 1823 Raden Tumenggung Panji Notonegoro diangkat sebagai pengganti Aryo Notoadiningrat, mengisi jabatan bupati yang telah kosong selama dua tahun (Lekkerkerker, 1931:506).

Probolinggo adalah daerah yang subur, sejak masa Jawa Kuno sudah memiliki areal persawahan yang luas. Negarakertagama pupuh XXXIV memberikan uraian tentang

persawahan di Banger (Slametmulyana, 1979:289-290). Berhasilnya petani mengolah sawah dapat dilihat dari luasnya sawah yang sudah digarap. Pada tahun 1823 Karesidenan Pasuruan dan Probolinggo berhasil mencetak sawah seluas 40.319 hektar (Elson, 1984:19). Kondisi semacam ini menarik orang asing untuk mengusahakan perkebunan, terutama tebu. Pada tahun 1856 terdapat 10 pabrik gula dengan areal tanaman tebu seluas 3.549 hektar (Kolonial Verslag, 1856). Jumlah ini masih harus ditambah lagi dengan perkebunan-perkebunan swasta dan penggilingan gula rakyat.

Dua penguasa Probolinggo yang tercatat menonjol dalam sejarah ialah Kyai Tumenggung Wiryowijoyo (1837-1840) dan Raden Tumenggung Wijoyokesumo (1888-1894). Kyai Tumenggung Wiryowijoyo berjasa karena usahanya membangun bendungan dan membuat proyek perairan Ronggojalu. Sedangkan Tumenggung Wijoyokesumo terkenal karena jasanya memperkenalkan tanaman ganyong. Umbi akar tanaman ini kaya akan tepung kanji. Penduduk memasaknya dengan cara ditanak dan dicampur dengan santan (Lekkerkerker, 1931). Bupati ganyong ini juga terkenal karena sifat kerakyatannya. Penduduk memberikan gelar sebagai Kanjeng Ganyong. Makamnya terletak di belakang Masjid Jami' Probolinggo hingga sekarang masih dihormati

Berdasar Ordonantie tanggal 20 Juni 1918 (Staatsblad 1918, No. 322) pemerintahan kabupaten dan kotapraja Probolinggo dipisahkan. Pemisahan berlangsung hingga tahun 1928. Berikutnya, berdasar Ordonantie tanggal 9 Agustus 1928, kotapraja dihapus, disatukan kembali dengan kabupaten (Staatsblad 1928, No.317). Pada masa pendudukan Jepang dan masa Republik mengalami pemisahan kembali. Akan tetapi, sejak 13 Agustus 1948 berdasar Undang-undang Pemerintahan Balatentara No. 70/J.Z/III/48, pemerintahan kota tidak diperkenankan melakukan usaha sendiri (AAS, No. Inv. 1247, ANRI). Dalam arti,

pemerintahan kota dihapus dan dipersatukan dengan kabupaten senama. Setelah pengakuan kedaulatan kota dan kabupaten dipisahkan kembali.

C. Fisik Kota dan Penduduk

Kota Probolinggo terletak di bagian timur Pulau Jawa, di pantai Selat Madura. Di sebelah timur Surabaya, Selat Madura menjadi lebih lebar dan lebih dalam. Antara Pulau Madura dan pantai Probolinggo jaraknya sekitar 40 mil laut (Jonge, 1989:4). Dermaga pelabuhan Probolinggo merupakan tonjolan daratan ke arah laut, menyerupai semenanjung dalam ukuran mini. Di tahun 1946 masih dijumpai genangan-genangan lumpur di bibir pantai. Ketinggian kota sekitar 4 m dari permukaan laut (Cipta Adi Pustaka, 1990:401).

Pusat kota ditandai dengan adanya alun-alun yang dikelilingi gedung pemerintah di sebelah selatan, masjid di sebelah barat, penjara di sebelah timur, dan kampung Cina (*pecinan*) (Kuntowijoyo, 1993:45). Di sebelah utara alun-alun terdapat stasiun kereta api. Alun-alun bagian tengah dibelah oleh jalan yang membujur utara selatan. Jalan ini bila terus ke arah selatan akan bertemu dengan jalan pos. Sepanjang jalan ini di tahun 1946 terdapat hotel, klub, dan gereja. Sebelah timur jalan, dengan dibatasi pemukiman, terdapat jalan atau kampung yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang Cina. *Chineesche voor straat* mempunyai arti ekonomis, sebab jalan ini ke arah utara dapat langsung ke pelabuhan. Hal ini memudahkan pengangkutan barang dari pelabuhan ke pemukiman Cina dan pasar di dekatnya dan sebaliknya. Sebelah barat jalan utama, juga dibatasi oleh pemukiman, terdapat jalan dan pemukiman khusus bagi orang-orang Eropa (*Town Plan of Probolinggo*, 1946).

Pemukiman bagi bumiputera terletak di pinggir kota, di bagian timur, barat, selatan, dan di utara dekat pelabuhan. Perkecualian untuk golongan priyayi, menempati pusat kota juga. Jadi, pribumi sengaja ditempatkan

di pinggir kota, mengitari pusat kota yang hanya untuk orang-orang Eropa, Cina, orang timur asing lain, dan segolongan kecil priyayi. Seperti kota yang mempunyai ciri Jawa lainnya, pemukiman Cina berdekatan dengan pasar. Sebagian besar aktivitas ekonomi orang-orang Cina memang di bidang perdagangan. Pasar kota terletak di kanan kiri jalan pos (*Town Plan of Probolinggo*, 1946).

Di samping jalan darat dan air, kota juga dilewati jalur kereta api yang menghubungkan Lumajang di sebelah selatan dan Pasuruan di sebelah barat. Angkutan *tram* yang dikelola *Probolinggo Stoomtram Maschapy* menghubungkan beberapa bagian kota sejak tahun 1894 (Tjiptoatmodjo, 1983:121).

Perhubungan jalur darat maupun laut memungkinkan terlaksananya hubungan antara daerah pedalaman dengan kota, antara kota dengan daerah sekitarnya, maupun antara satu kota dengan kota lainnya. Jalur darat tidak hanya penting untuk perdagangan darat tetapi juga untuk keperluan pemerintahan dan gerakan militer. Pengawasan terhadap pemerintahan tingkat bawah oleh atasan hanya dapat dilakukan dengan baik apabila tersedia jalur jalan yang baik. Demikian pula kondisi jalan sangat berpengaruh atas kelancaran gerakan militer pada masa perang.

Jalan pos yang dibangun pada masa kekuasaan Daendels dan cukup terkenal dalam sejarah, pada hakikatnya sebagian besar hanya memperbaiki jalan yang telah ada, sehingga lebih keras, lebih lebar, dan lebih memadai untuk dilalui kereta-kereta kuda (Tjiptoatmodjo, 1983:121). Jalan pos setelah kota Pasuruan ke arah timur melewati Rejoso, Grati, terus ke kota Probolinggo. Ke arah timur melalui Kraksaan, Paiton, hingga memasuki Karesidenan Besuki. Sebagian besar jalan pos Daendels melintasi kota-kota di tepi pantai Selat Madura. Meskipun mula-mula jalan ini dibangun dengan tujuan untuk memudahkan gerakan militer Belanda di waktu perang, namun manfaat lain ialah makin lancarnya komunikasi antara kota-kota yang dilaluinya.

Di kota Probolinggo jalan pos merupakan jalur utama. Jaringan jalan yang merupakan cabang dari jalan pos ini menghubungkan kota dengan daerah pedesaan dan kota-kota pedalaman. Masih di dalam kota, terdapat jalan simpang ke arah selatan menuju Lumajang dan lain-lain jalan simpang menuju ke berbagai tempat di pedalaman, antara lain ke Jember.

Penduduk kota Probolinggo berdasar perhitungan tahun 1930 berjumlah 90.411 jiwa. Terdiri atas orang Eropa sebesar 952 orang, bumiputera 85.257 orang, orang Cina 3.719 orang, dan timur asing lainnya 483 orang (Stibbe dan Sondbergen, 1939:1524). Bumiputera terdiri dari orang Jawa dan Madura (pandhalungan). Pandhalungan merupakan pendukung budaya campuran Jawa dan Madura. Imbangan jumlah penduduk Madura dengan penduduk Jawa menunjukkan mayoritas orang Madura. Menurut perhitungan tahun 1845 jumlah penduduk orang Jawa di Probolinggo sebesar 18.456 jiwa dan penduduk Madura 56.317 jiwa. Orang pandhalungan dimasukkan dalam kelompok orang Madura (Bleeker, 1847:150-161). Orang Jawa yang mendiami ujung timur Jawa Timur sejak lama jumlahnya tidak begitu banyak. Populasi orang Jawa semakin merosot karena adanya berbagai peperangan dan pindah ke tempat lain. Orang Jawa sering pindah sekehendak hatinya. Tempat tinggal tidak dipedulikan, karena tanah yang belum dibuka masih demikian luas. Bila menghadapi masalah di daerahnya, cenderung pergi ke tempat lain yang lebih aman (Onghokham, 1985:61).

Sementara jumlah orang Jawa menipis, migrasi orang-orang Madura semakin bertambah besar. Proses migrasi orang-orang Madura ke Jawa berlangsung selama berabad-abad. Proses ini melalui berbagai saluran, seperti perdagangan, pelayaran, penangkapan ikan, pencarian nafkah sebagai tenaga kerja, dan ekspedisi militer (Tirtoatmodjo, 1983:303). Daerah pantai ujung timur Jawa Timur adalah daerah seberang Selat Madura yang banyak dikunjungi perahu-perahu nelayan Madura.

Para nelayan bertujuan menjual hasil tangkapan ikannya di bandar-bandar kecil di pantai daratan Jawa. Sebagian nelayan ini tertarik untuk menetap di daerah Probolinggo dengan membuka hutan atau menyiapkan tanah untuk pemukiman di belakang pantai. Hal semacam ini juga terjadi di kalangan pedagang-pedagang Madura yang berkunjung di pantai daratan Jawa dengan perahu-perahu kecil berisi muatan barang dagangan.

Sejak awal abad ke-19 ketika di Probolinggo dibuka perkebunan-perkebunan, baik oleh pihak swasta maupun pemerintah, banyak orang Madura yang bekerja mencari nafkah sebagai tenaga kasar (Jonge, 1989:24). Pembukaan perkebunan tebu dan tembakau mendorong migrasi besar-besaran. Pertengahan abad ke-19 orang Madura yang bertempat tinggal di Jawa Timur dua kali lipat lebih banyak daripada yang bertempat tinggal di pulau Madura sendiri (Jonge, 1989:25).

Bagi orang-orang Madura, Selat Madura seolah-olah merupakan suatu teluk. Sepanjang tahun terdapat lalu lintas barang dan orang yang ramai di antara kota-kota dan desa-desa pantai di sekitar selat. Biasanya para migran berangkat ke daerah yang berhadapan dengan kabupatennya (Jonge, 1989:25). Jadi orang-orang dari Sampang bergerak ke jurusan Probolinggo. Di daerah-daerah pantai yang saling berhadapan pun digunakan dialek yang sama. Probolinggo juga berfungsi sebagai tempat transit dalam proses migrasi orang-orang Madura. Dari sini orang-orang ini menyebar ke daerah Jember, Lumajang, dan Malang (Tirtoatmodjo, 1983:310). Menurut catatan syahbandar Probolinggo, orang Madura yang masuk mencari pekerjaan dengan menggunakan perahu pada tahun 1928 berjumlah 32.940 jiwa. Orang Madura yang masuk melalui Pasuruan sekitar 1.529 orang. Menurut catatan syahbandar itu selanjutnya, banyak dari migran Madura yang tinggal di Jawa dan hidup berkecukupan (ANRI, 1978:CLXVIII).

Pada zaman pendudukan Jepang migrasi berhenti sama sekali. Tentara pendudukan

Jepang memaksa penduduk pulau itu mencari nafkah di tempat mereka sendiri dan lalu lintas orang dibatasi dengan aneka macam peraturan. Satu-satunya bentuk migrasi yang masih berarti adalah migrasi tenaga kerja. Banyaknya penduduk yang tidak diketahui jumlahnya dipekerjakan sebagai romusha, pekerja paksa, di wilayah atau di luar wilayah Indonesia (Jonge, 1989:25).

D. Ekonomi dan Sosial

Mata pencarian penduduk kota bervariasi, seperti sebagai petani, pedagang, nelayan, tenaga kasar, tukang, dan pegawai. Kedua etnik, Jawa dan Madura, mempunyai kultur sendiri yang berbeda. Kultur Jawa yang halus karena terbawa oleh kehidupan persawahan berbeda dengan kultur Madura yang sedikit kasar karena ekologi ladang. Percampuran etnik memang sering terjadi dan orang Madura terserap dalam kultur Jawa, khususnya kelompok menengah dan atas, sedangkan kelompok bawah masih bertahan dalam isolasi kultur Madura sendiri. Orang-orang Jawa tetap menekuni pekerjaan sebagai petani dan orang Madura sebagai nelayan, pedagang, dan buruh (Suhartono, 1995:33).

Umumnya penduduk menggunakan bahasa Jawa dan Madura, tergantung siapa yang diajak komunikasi. Penduduk dapat berbahasa Jawa *ngoko*, tetapi juga *krama*. Bahasa Jawa *ngoko* dan *krama* diucapkan dengan logat Madura. Penggunaan bahasa tergantung keperluan. Di kantor-kantor biasanya digunakan bahasa Jawa *krama*. Di daerah Mayangan, tempat sebagian besar orang-orang Madura tinggal sebagai pekerja kasar, juga dipergunakan dua bahasa. Bahkan ada kecenderungan, anak-anak muda lebih suka menggunakan bahasa Jawa dialek pesisiran dengan logat Madura (Sapto, 1999:36). Hal ini dapat dimengerti, sebab sebagian besar anak-anak muda itu kelahiran Probolinggo, generasi kedua atau ketiga. Berbeda dengan orang tua dan kakek nenek mereka, datang langsung dari pulau sehingga tampak masih kental bahasa Maduranya.

Ketela menjadi hasil penting pertanian di samping padi. Makanan pokok penduduk berupa beras (Stibbe dan Sondbergen, 1939:1524). Areal pertanian terutama membentang di bagian timur kota. Meskipun terdapat juga di bagian barat dan selatan, tetapi tidak seluas di bagian timur. Di bagian utara, sepanjang pantai, tanah dibuka oleh orang-orang Madura. Daerah ini kemudian didiami secara turun temurun dan diklaim sebagai milik sendiri. Hal ini makin meluas karena jumlah migran semakin banyak, sehingga kontrol terhadap tanah semakin lemah (Suhartono, 1995:47). Tanah-tanah di sepanjang pantai banyak difungsikan sebagai tambak. Di samping mengelola tambak, banyak penduduk yang juga sekaligus pemilik sawah. Produk utama dari usaha perikanan tambak adalah ikan bandeng. Produk sampingannya yang terpenting adalah udang. Ikan bandeng umumnya dipasarkan dalam bentuk ikan segar atau ikan pindang (pindang bandeng), dan bisa dipastikan tidak pernah ikan bandeng diproses menjadi ikan asin. Harga ikan bandeng juga jauh lebih mahal daripada harga ikan pada umumnya (Masyuri, 1995:150-152).

Penggolongan petani didasarkan pada pemilikan tanah. Di sini terlihat pengaruh Mataram sangat kuat. Pada masa kolonial hak atas pemilikan tanah mempunyai implikasi pada hak dan kewajiban terhadap desa. Menurut Domis, Residen Pasuruan, stratifikasi petani di Probolinggo didasarkan pada keinginan untuk bekerja pada penguasa dan kerja wajib setiap tahun (Elson, 1984:10-16). Kiranya hal ini suatu kesalahan. Bekerja untuk penguasa dan kerja wajib merupakan konsekuensi pemilikan atas tanah, bukan kriteria stratifikasi. Konsep hubungan kawula-gusti mengatur hubungan antara penguasa dengan warga desa (Onghokham, 1983:61-64). Berdasar pada sistem pemilikan tanah petani dapat dibedakan : (1) *wong kenceng* (bahasa Madura: *oreng kenceng*) ialah warga desa inti yang telah mendapat bagian tanah milik desa atau tanah

komunal; (2) *wong kendo* (bahasa Madura: *oreng kendo*) ialah yang memiliki pekarangan dan rumah serta masih termasuk dalam daftar warga desa yang pada suatu saat (kalau ada lowongan) akan menjadi golongan penerima bagian tanah desa; (3) *tumpang* (istilah lain *indung*) adalah yang hanya memiliki rumah, menumpang di halaman atau pekarangan orang lain; (4) *tumpang tlosor* adalah yang sama sekali tidak memiliki rumah dan tinggal atau menumpang di rumah orang lain (Moertono, 1985:144). Terdapat perbedaan istilah untuk beberapa daerah, walaupun esensinya sama. Seperti istilah *wong kenceng* di tempat lain disebut *kuli kenceng*, *kuli ngarep*, *kuli kuwat*, *kuli gogol*, dan *sikep*. *Wong kendo* disebut juga dengan *kuli kendo*, *kuli mburi*, dan *kuli setengah kenceng* (Kano, 1984:28-85). Dalam hirarkhi status, keempat golongan dapat dibedakan sebagai golongan petani pemilik (*wong kenceng* dan *wong kendo*), golongan petani penyewa (*tumpang*) dan buruh tani atau pekerja upahan (*tumpang tlosor*).

Stratifikasi sosial juga didasarkan pada lamanya bermukim. Status tertinggi diberikan kepada keturunan pendiri-pendiri desa. Pendiri desa biasanya adalah pembuka-pembuka tanah (Suryo, 1985:19), sehingga sekaligus menyandang sebagai pemilik tanah. Asal tidak dipindahtanggankan, keturunan pendiri desa mempunyai status sama, yaitu pemilik tanah. Dalam diri keturunan pendiri desa kriteria pemilikan tanah dan lamanya bermukim.

Usaha perdagangan sebagian besar ditangani golongan etnis lain, terutama Cina (AAS, No. Inv. 152, ANRI). Bumiputera yang berprofesi sebagai saudagar jumlahnya kecil. Penduduk bumiputera sebagian besar sebagai pedagang kecil atau penjaja berbagai barang, seperti sayuran, makanan, dan buah-buahan (Sapto, 1999:38). Khususnya tentang orang-orang Cina, penduduk kota mempunyai kesan yang kurang menyenangkan. Orang-orang Cina pada akhir abad XVIII dan awal abad XIX mengeksploitasi penduduk melalui

desa-desa yang disewa. Orang-orang Cina juga menguasai bidang ekonomi, baik sebagai pengusaha dan pedagang besar, tetapi juga sebagai pedagang menengah dan kecil. Lebih dari satu abad, sejak berakhirnya kekuasaan Kumpeni pada tahun 1799, orang-orang Cina bergerak di bidang ekspor dan impor, pemilik toko, pabrik roti, pemungut pajak, dan rentenir (Tirtoatmodjo, 1983:327). Sebagai rentenir, di samping meminjamkan uang dengan bunga tinggi, mereka menyewakan tanah kepada penduduk (Sapto, 1999:39). Orang-orang Cina membeli tanaman petani dengan sistem *ngijo* (Stibbe dan Sondbergen, 1939:1524), yaitu pembelian tanaman petani ketika masih dalam keadaan muda (*ijo* = hijau, tanaman padi ketika masih muda) atau belum siap panen. Biasanya petani menjual tanamannya dengan sistem *ngijo* karena terdesak kebutuhan. Oleh karenanya, dibeli dengan harga rendah. Orang Cina juga meminjamkan uang kepada pedagang-pedagang kecil bumiputera di desa-desa. Hal ini dilakukan dengan sangat rapi (Stibbe dan Sondbergen, 1939:1524).

Di kalangan pedagang, perbedaan status sosial lebih banyak didasarkan pada penguasaan modal. Oleh karena itu, dikenal pedagang besar dan pedagang kecil. Pedagang besar di kalangan penduduk dikenal dengan sebutan saudagar. Dengan demikian golongan saudagar dalam hirarkhi sosial menempati posisi atas, karenanya memiliki status sosial tinggi di masyarakat.

Pasar di kota banyak menawarkan ikan laut, ikan tawar tambak, garam, dan sarang burung. Juga hasil tanaman ekspor, seperti jagung, kacang, tembakau, dan minyak jarak. Barang impor yang ditawarkan, ialah rotan, karung, gula Jawa, minyak kelapa, kain Madura, dan besi batangan (Tjiptoatmodjo, 1983:327). Terdapat empat buah pasar di kota yang sibuk dan ramai pengunjung. Kesibukan pasar ditunjang adanya prasarana jalan yang baik. Jalan-jalan yang cukup baik memungkinkan penduduk sekitar kota dapat berbelanja di kota dan hasil bumi dari pedalaman dapat dipasarkan ke kota.

Di kota terdapat dua buah pabrik gula, yaitu Wonoasih dan Umbul. Masing-masing mempunyai areal perkebunan tersendiri. Akan tetapi, tidak jarang pabrik gula menyewa tanah penduduk untuk ditanami tebu. Petani yang tanahnya disewa dapat bekerja sebagai buruh di perkebunan tebu dengan upah harian (Stibbe dan Sondbergen, 1939:1525). Tanah yang disewa, biasanya sawah, dipilih yang dekat dengan desa-desa yang padat penduduknya, dengan harapan mudah memperoleh tenaga kerja. Meskipun telah merekrut tenaga kerja dari petani dan buruh tani, perkebunan masih kekuarangan tenaga kerja dan untuk mencukupinya direkrut tenaga kerja upahan lain. Terciptalah kelompok sosial lain, yakni buruh. Dalam kelompok ini juga dapat dimasukkan pekerja kasar lainnya, seperti kuli pelabuhan. Banyak buruh perkebunan dan pelabuhan berasal dari etnik Madura (AAS, No. Inv. 1246, ANRI). Kelompok pekerja kasar pelabuhan banyak mendiami pemukiman padat di daerah Mayangan.

Pada masa kejayaan kerajaan Mataram, wilayahnya yang luas dibagi menjadi *negara* atau *kuthanegara* (ibukota) sebagai pusat lingkaran, *negaragung* atau *negara agung* (daerah inti) dan *mancanegara* (daerah luar, termasuk pesisir), serta tanah *sabrang* (tanah di seberang laut). Pembagian ini direncanakan menurut lingkaran konsentris, ketika istana sebagai pusat lingkaran sampai berakhir dengan wilayah-wilayah yang paling jauh letaknya (Moertono, 1985:130-131). *Negara* atau *kuthanegara* sebagai ibukota kerajaan, biasanya pada keempat sudut di bangun benteng. *Negaragung*, yaitu daerah yang terletak di luar dan di sekitar *negara*. *Negaragung* menjadi daerah *apanage* (*lungguh*) kaum pembesar dan bangsawan istana. Di luar *negaragung* terletak *mancanegara*. *Mancanegara* diperintah bupati-bupati yang berkedudukan sebagai raja bawahan kerajaan Mataram. Bupati merupakan penguasa-penguasa daerah anak keturunan raja, atau penguasa lain yang "asli" dari daerah itu atau anak keturunan suatu keluarga bangsawan yang pada masa lalu dengan sengaja ditanam

di daerah oleh raja Mataram (Moertono, 1985). Probolinggo termasuk *mancanegara*.

Di *mancanegara*, termasuk di pesisir, penguasa dinamakan bupati. Pada hakikatnya bupati seorang raja pula. *Mancanegara* dahulu merupakan kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri. Masing-masing dikepalai seorang raja yang pada abad ke-17 ditaklukkan dan menjadi bawahan Kerajaan Mataram. Maka dari itu, "*mancanegara* bukanlah satu kesatuan administrasi pemerintahan, tetapi sekelompok negara yang masing-masing mempunyai kepala yang disebut bupati dan tunduk kepada raja Mataram" (Moertono, 1985; Kartodirdjo, 1991).

Masyarakat Jawa membedakan gelar yang biasa dipakai golongan aristokrasi menjadi dua, yaitu gelar kebangsawanan dan gelar kepangkatan. Gelar kebangsawanan, seperti *Pangeran*, *Ratu*, *Raden*, dan *Mas*. Gelar kepangkatan, seperti *Bupati*, *Patih*, *Wedana*, dan *Demang*. Secara bertingkat dari bawah ke atas gelar bupati pesisir ialah *Tumenggung*, *Adipati*, *Pangeran*, dan *Panembahan*. *Pangeran* pada dasarnya gelar tertinggi pejabat pemerintah (Kartodirdjo, dkk, 1991:11). Akan tetapi, ketika daerah pesisir jatuh ke tangan Kumpeni gelar tertinggi pejabat pemerintahan adalah *Panembahan*, seperti terjadi pada penguasa Madura Barat (Tirtoatmodjo, 1983:372). Di samping gelar jabatan hampir semua bupati mempunyai gelar kebangsawanan *Raden*. Gelar *Raden* diperoleh sebagai warisan nenek moyangnya atau bisa juga karena jasanya (Kartodirdjo, 1991:12).

Dari uraian tentang bangsawan pesisir di atas tampak bahwa masyarakat Probolinggo dapat dibedakan dua golongan, yaitu golongan yang memerintah dan golongan *wong cilik* (orang kebanyakan). Pemerintah kolonial tetap mempertahankan birokrasi tradisional Jawa, sehingga kedua golongan masih tampak jelas. Golongan yang memerintah terdiri atas bupati, patih, wedana, dan demang, beserta kerabatnya. Golongan yang memerintah ditandai dengan gelar kepangkatan dan atau gelar kebangsawanan. Golongan *wong cilik*, golongan

di luar priyayi, artinya yang tidak mempunyai gelar kepangkatan atau kebangsawanan.

Pada akhir pemerintahan Hindia Belanda, Kabupaten Probolinggo dibagi menjadi tiga distrik, yaitu Probolinggo (kota), Tongas, dan Sukapura. Distrik Probolinggo dibagi lagi ke dalam lima onderdistrik, yaitu Probolinggo, Kanigaran, Wonoasih, Bantaran, dan Leces (Stibbe dan Sondbergen, 1939:1525). Setiap distrik dikepalai seorang wedana dan setiap onderdistrik dikepalai seorang asisten wedana. Bupati dibantu oleh seorang patih, yang membantu menjalankan tugas administrasi dan mewakili bupati bila berhalangan. Dari bupati hingga sistem wedana merupakan hirarkhi pejabat pemerintahan bumiputera yang mendapat gaji dari pemerintah dan kedudukannya sebagai pegawai Pemerintah Dalam Negeri (Hatmosoeprobo, 1995:57).

Masih terdapat para pejabat bawahan atau pegawai negeri biasa yang jumlahnya justru cukup besar. Kelompok pegawai ini banyak bekerja di dinas-dinas pemerintah, juga sebagai guru. Kelompok yang sering disebut sebagai priyayi rendah ini hidup dalam bayang-bayang priyayi menengah dan tinggi, yaitu wedana, patih, dan bupati. Penguasa Jepang mempertahankan sebagian besar dari mereka untuk menjalankan roda pemerintahan (Lombard, 1996:118). Dengan terbentuknya golongan berpendidikan pegawai kantoran, terjadilah metamorfosa sosial kaum ningrat-feodal menjadi kaum menengah kota. Para pegawai, baik tinggi ataupun rendah, merupakan cadangan utama untuk mengisi posisi-posisi lowong setelah Proklamasi Kemerdekaan.

E. Sastra sebagai Sumber Informasi Sejarah

Anjasmara ari mami
Masmirah kulaka warta
Dasihmu tan wurung layon
Aneng kuta Prabalingga
Prang tanding lan Urubismo
Kario mukti wong ayu
Pun kakang pamit palastra

Tembang Asmaradana tersebut melukiskan ketika Darmarwulan atau Damar

Sasongko merasa hampir kalah ketika perang tanding dengan Urubismo atau Menakjinggo. Darmarwulan mengeluh pada istrinya, Anjasmara, putri dari Patih Logender. Di samping pesan keputusan seorang ksatria yang merupakan jago dari ratu Majapahit, tembang ini juga memberikan paling tidak dua informasi. Pertama, penggunaan secara eksplisit kata *kuta* (kota) dan bukan *tlatah* (wilayah, daerah). Ini menunjukkan bahwa Probolinggo, ketika tembang itu dicipta, telah memperlihatkan karakteristik sebuah kota. Kedua, penggunaan kata Prabalingga dan bukan Banger. Besar kemungkinan tembang ini dibuat setelah tahun 1770, sebab nama Prabalingga baru dipergunakan pada masa itu. Jadi, apa yang digambarkan dalam tembang dengan saat pembuatannya tidak bersamaan dalam waktu. Dengan kata lain, tembang Asmaradana ini mengungkapkan kisah masa Majapahit tetapi dibuat sesudah tahun 1770. Apabila kemungkinan ini diterima, pada seperempat akhir abad ke-18 Probolinggo telah menjadi sebuah kota yang cukup penting.

F. Simpulan

Uraian pada bab terdahulu menunjukkan bahwa Probolinggo pada masa menjelang dan awal revolusi merupakan salah satu kota terpenting di Ujung Timur Pulau Jawa. Probolinggo menjadi tujuan migrasi penduduk dari Madura. Hal tersebut menyebabkan terjadinya percampuran budaya Jawa dengan Madura. Dalam hal mata pencaharian, masyarakat Jawa cenderung mengandalkan bidang pertanian, sedangkan masyarakat Madura memasuki bidang pekerjaan yang lebih bervariasi.

Tata fisik kota dan kondisi sosial budaya masyarakat Probolinggo menampakkan adanya pengaruh Mataram. Tanahnya yang subur dan didukung adanya irigasi dan prasarana transportasi menyebabkan Probolinggo menjadi salah satu andalan pendapatan penguasa saat itu. Keadaan tanah yang subur juga memungkinkan desa-desa di Probolinggo digadaikan oleh penguasa kepada pengusaha

Cina. Hal tersebut menjadi peluang bagi pengusaha Cina untuk menjadi penguasa di wilayah Probolinggo. Oleh karena itu, beberapa kali Probolinggo dipimpin Bupati dari etnis Cina.

Daftar Pustaka

- Arsip Nasional Republik Indonesia. 1949. *Algemeene Secretarie (AS), 1945-1949*, ANRI-Jakarta.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 1950. *Inventaris van het Archief van de Algemene Secretarie (AAS) en het Kabinet van de Gouverneur General, 1944-1950*, ANRI Jakarta.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 1978. *Memori Serah Terima Jabatan 1921-1930*. Jakarta: ANRI.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. *Arsip Jawa Timur, koleksi 6: Probolinggo*. Jakarta: ANRI.
- Bleeker. 1847. *Bijdragen tot de Statistiek der Bevolking van Java. TNI. IXe. Jaargang. IV. h: 150-161.*
- Burger, D.H. 1960. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Jilid I. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Cipta Adi Pustaka. 1990. *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jilid XIII. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
- Cipta Adi Pustaka. 1989. *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jilid VI. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
- Elson, R.E. 1984. *Javanese Peasants and Colonial Sugar Industri. Impact and Change in an East Java Residency 1830-1940*. Singapore: Oxford University Press.
- Graaf, H.J. de. 1986. *Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung*. Jakarta: Pustaka Grafitipers.
- Hatmosoeprobo, Soehardjo. 1995. *Pemerintah Kolonial Pada Abad XIX dan Perintis Pergerakan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Jonge, Huub de. 1989. *Madura Dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam. Suatu Studi Antropologi Ekonomi*. Jakarta: KITLV-LIPI dan Gramedia.

- Kahin, George McTurnan. 1995. *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Judul Asli: Nationalism and Revolution in Indonesia, Terj. Nin Bakdi Soemanto, Solo/Jakarta: Sebelas Maret University Press dan Pustaka Sinar Harapan.
- Kano, Hiroyoshi. 1984. "Sistem Pemilikan Tanah dan Masyarakat Desa di Jawa Abad XIX." Dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds.). *Dua abad Penguasaan Tanah. Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa Dari Masa ke Masa*. Jakarta: Yayasan N Obor dan Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono dan Suryo, Djoko. 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Kartodirdjo, Sartono. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900. Dari Emporium ke Imperium*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono. dkk. 1987. *Perkembangan Peradaban Priyayi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kuntowijoyo, 1993. *Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Bentang Intervisi Utama.
- Lekkerkerker, J.G.W. 1931. "Probolinggo: Geschiedenis en Overlevering." *De Indische Gids*. 53 (10). h: 481-512.
- Lombard, Denys. 1996. *Nusa Jawa: Silang Budaya. Kajian Sejarah Terpadu. Jilid I: Batas-batas Pembaratan*. Judul Asli: Le Carrefour Javanais. Essai d'histoire Globale. I. le Limited de l'occidentalisation. Terj. Gramedia. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Masyuri. 1995. *Menyisir Pantai Utara. Usaha dan Perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura 1850-1940*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara dan Perwakilan KITLV.
- Moertono, Soemarsaid. 1985. *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau. Studi Tentang Masa Mataram II Abad XVI Sampai XIX*. Judul Asli: State and Statecraft in Old Java. A Study of the Later Mataram Period 16th to 19th Century. Terj. Yayasan Obor. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Naskah Inventaris Arsip Kartografi. *Town Plan of Probolinggo*. No. 1299/56/XLII.
- Onghokham. 1983. *Rakyat dan Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Onghokham. 1985. "Gerakan Cina: Tuntutan Persamaan Hak." *Prisma*. No. 8. Tahun ke X. Jakarta: LP3ES. h: 61-64.
- Raport. 1813. *Raport van de Landschapen Besuki en Panarukan*.
- Sapto, Ari. 1999. "Gerilya Kota di Probolinggo," 1947-1949. Thesis tidak diterbitkan. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Slametmulyana. *Negarakeragaman dan Tafsir Sejarahnya*. Jakarta: Bhartara Karya Aksara.
- Stibbe, D.G dan Sondbergen, F.J.W.H. 1939. *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Suhartono. 1995. *Bandit-bandit Pedesaan di Jawa. Studi Historis 1850-1942*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Suryo, Djoko. 1985. "Gerakan Petani." *Prisma*. No. 11. Tahun ke XIV. Jakarta: LP3ES. h: 16-24.
- The. 1813. *The Acting Resident: Surabaya, Probolinggo, Besuki, Panarukan*.
- Tjiptoatmodjo, F.A. Sutjipto. 1983. "Kota-kota Pantai di Sekitar Selat Madura. Abad XVII Sampai Medio Abad XIX." Disertasi Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.